

Peningkatan Literasi Keuangan dan Tata Kelola Desa Wisata Melalui Program Pendampingan Masyarakat di Desa Wisata Plosokuning, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Azizah Fauziyah¹, Dede Kurnia², Nandang³, Ismail Yusup⁴, Nizza Nadya Rachmani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Received : 8 Oktober 2025, Revised : 21 Oktober 2025, Published : 30 Oktober 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Azizah Fauziyah

E-mail: azizahfauziyah@upi.edu

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas tata kelola pada pengelola Desa Wisata Plosokuning, Kabupaten Sleman, Indonesia. Kegiatan dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan manajemen keuangan yang menyebabkan pengelolaan dana desa wisata belum berjalan optimal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap pelaksanaan mencakup pelatihan literasi keuangan dasar, pendampingan hybrid penerapan pencatatan keuangan sederhana, serta sosialisasi kolaboratif dengan pemangku kepentingan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengetahuan peserta sebesar 40% serta perubahan perilaku dalam penerapan pencatatan kas dan perencanaan anggaran. Kendala utama meliputi perbedaan tingkat literasi keuangan peserta dan keterbatasan sarana teknologi, namun diatasi dengan penyusunan materi bertahap dan penyediaan alternatif buku kas manual. Secara keseluruhan, program ini berhasil memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa wisata, sekaligus menjadi model replikasi bagi desa wisata lain di Indonesia.

Kata kunci - literasi keuangan, tata kelola, desa wisata, pemberdayaan masyarakat, pendampingan hybrid

Abstract

This community service program aims to improve financial literacy and governance capacity among the managers of Plosokuning Tourism Village, Sleman Regency, Indonesia. The program was motivated by low financial management skills, which have resulted in suboptimal management of village tourism funds. The implementation method used a participatory approach through four stages: preparation, implementation, evaluation, and follow-up. The implementation phase included basic financial literacy training, hybrid mentoring for the implementation of simple financial record keeping, and collaborative outreach with village stakeholders. Results showed an average 40% increase in participant knowledge and behavioral changes in cash recording and budget planning. Key challenges included differences in participants' financial literacy levels and limited technological resources, but these were overcome by developing phased materials and providing alternatives to manual cash books. Overall, this program successfully strengthened transparency and accountability in the financial management of the tourism village and served as a model for replication for other tourism villages in Indonesia.

Keywords - financial literacy, governance, tourism village, community empowerment, hybrid mentoring

How To Cite : Fauziyah, A., Kurnia, D., Nandang, N., Yusup, I., & Rachmani, N. N. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan dan Tata Kelola Desa Wisata Melalui Program Pendampingan Masyarakat di Desa Wisata Plosokuning, Kabupaten Sleman, Yogyakarta . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(2), 1304–1311. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.598>

Copyright ©2025 Azizah Fauziyah, Dede Kurnia, Nandang, Ismail Yusup, Nizza Nadya Rachmani

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Literasi keuangan menjadi kemampuan penting bagi individu dan komunitas dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang rasional terkait tabungan, investasi, dan pengeluaran, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan jangka panjang (Lusardi & Mitchell, 2014). Tingkat literasi keuangan yang baik juga berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan menghindari risiko keuangan, baik di level individu maupun komunitas (World Bank, 2014).

Di Indonesia, upaya peningkatan literasi keuangan telah menjadi agenda nasional. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang, yaitu 49,68 persen pada tahun 2022 (OJK, 2022). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Data terbaru juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sekaligus menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di daerah pedesaan (BPS, 2024).

Sebagai salah satu sektor strategis, pengembangan desa wisata menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan pentingnya integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan desa wisata (Kemenparekraf, 2023). Selain itu, Bappenas menempatkan penguatan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis komunitas sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional (Bappenas, 2020). Upaya ini juga didukung oleh kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menekankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa wisata secara mandiri dan berkelanjutan (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha di desa wisata masih menghadapi kendala dalam manajemen keuangan, termasuk pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta perencanaan anggaran jangka panjang (Sukmana & Ibrahim, 2021). Selain persoalan teknis, tantangan sosial seperti rendahnya kepercayaan diri dan keterbatasan kapasitas manajerial juga menghambat pengelolaan yang akuntabel (Haryanto, 2019). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat desa wisata menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada literasi keuangan di Desa Wisata Plosokuning dirancang sebagai respon terhadap kondisi tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menerapkan pendekatan pendampingan berbasis komunitas untuk memastikan penerapan praktik keuangan sederhana dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Putri & Hidayat, 2023). Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi pada upaya memperkuat kapasitas pengelola desa wisata dalam aspek tata kelola keuangan sekaligus mendukung tujuan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Wisata Plosokuning, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selama periode Juni hingga Juli 2025. Metode pelaksanaan disusun dengan pendekatan partisipatif, mengutamakan keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra kegiatan.

1. Tahap Persiapan

Tim pelaksana memulai program dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pegiat desa wisata. Observasi ini mencakup wawancara dengan pengelola, pemetaan kondisi keuangan desa, serta analisis demografi peserta. Informasi ini digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang kontekstual. Modul memuat materi dasar literasi keuangan, pencatatan sederhana, pengelolaan arus kas, dan perencanaan anggaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- a. Pelatihan: Workshop interaktif mengenai manajemen keuangan dasar.
- b. Pendampingan Hybrid: Dilakukan secara tatap muka dan daring untuk membantu peserta menerapkan pencatatan keuangan dalam aktivitas sehari-hari.

- c. Sosialisasi Stakeholder: Melibatkan pemerintah desa, NGO, dan akademisi untuk membangun dukungan ekosistem.
 - d. Link and Match: Menjembatani pengelola dengan pihak eksternal guna memperluas jaringan kolaborasi.
3. Tahap Evaluasi
- Evaluasi dilakukan melalui tiga mekanisme:
- a. Formatif: Observasi partisipasi dan pemahaman selama pelatihan.
 - b. Sumatif: Angket kepuasan, wawancara, dan penilaian keterampilan pasca kegiatan.
 - c. Monitoring Keberlanjutan: Meninjau penerapan praktik pencatatan beberapa minggu setelah kegiatan.
4. Tahap Tindak Lanjut
- Tindak lanjut berupa penyusunan laporan hasil kegiatan, penyediaan modul pelatihan lanjutan, komunikasi daring pasca kegiatan, serta publikasi artikel ilmiah, media massa, dan video dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pendampingan literasi keuangan di Desa Wisata Plosokuning dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, mulai dari persiapan hingga evaluasi akhir. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dengan mengedepankan peran aktif masyarakat setempat dalam seluruh proses kegiatan (Supriyadi & Wulandari, 2023).

Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahap awal meliputi observasi lapangan, koordinasi dengan pemerintah desa dan pengurus desa wisata, serta penyusunan modul pelatihan berbasis kebutuhan lokal. Survei pendahuluan menunjukkan sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang teratur dan masih mencampur kas pribadi dengan kas usaha. Kondisi ini sesuai dengan temuan (Sukmana & Ibrahim, 2021) yang menegaskan lemahnya praktik manajemen keuangan di unit usaha berbasis komunitas.

Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program, sebagaimana disarankan dalam praktik pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi akademik dan lokal (Rahmawati & Kurniadi, 2021).

Sosialisasi dan Rekrutmen Peserta

Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan terbuka di balai desa serta media daring komunitas. Antusiasme warga cukup tinggi, terbukti dari jumlah pendaftar yang melebihi target awal. Strategi sosialisasi berbasis partisipasi warga ini mendukung prinsip penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana diuraikan oleh (Molyneaux & Scott, 2017) dalam konteks *community-based tourism* (CBT).

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan inti dilaksanakan melalui pelatihan intensif dua hari disertai sesi praktik pencatatan transaksi sederhana menggunakan buku kas manual. Metode ini dipilih karena mayoritas peserta belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan arus kas (Ambarwati & Suryanto, 2020).

Setelah pelatihan, pendampingan lanjutan dilakukan dengan model hybrid mentoring, yaitu kombinasi pertemuan tatap muka mingguan dan bimbingan daring. Hasil monitoring menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta sebesar 40% dibandingkan baseline. Pencapaian ini sejalan dengan temuan (Nugroho & Sari, 2022) yang menunjukkan efektivitas pendekatan pendampingan hibrida dalam memperkuat praktik literasi keuangan pelaku usaha mikro. Berikut dilampirkan foto-foto kegiatan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Implementasi Praktik dan Hambatan Lapangan

Sebanyak 60% peserta mulai melakukan pencatatan transaksi harian dengan format sederhana, dan sekitar 35% di antaranya telah memisahkan kas usaha dari kas pribadi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyediaan format pencatatan manual yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sebagaimana direkomendasikan oleh (Widodo & Suryani, 2022).

Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perbedaan tingkat literasi antar peserta, keterbatasan waktu karena pekerjaan lain, serta keterbatasan sarana teknologi. Untuk mengatasi hal ini, tim menerapkan strategi *learning by doing* yang menekankan pembiasaan praktik dan umpan balik langsung, sesuai dengan model pembelajaran berbasis pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat (Cooper & Hall, 2018). Berikut dilampirkan foto-foto kegiatan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.

Dampak dan Implikasi Sosial

Sebanyak 60% peserta mulai melakukan pencatatan transaksi harian dengan format sederhana, dan sekitar 35% di antaranya telah memisahkan kas usaha dari kas pribadi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyediaan format pencatatan manual yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sebagaimana direkomendasikan oleh (Widodo & Suryani, 2022).

Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perbedaan tingkat literasi antar peserta, keterbatasan waktu karena pekerjaan lain, serta keterbatasan sarana teknologi. Untuk mengatasi hal ini, tim menerapkan strategi *learning by doing* yang menekankan pembiasaan praktik dan umpan balik langsung, sesuai dengan model pembelajaran berbasis pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat (Cooper & Hall, 2018).

Relevansi dengan Tujuan Pembangunan Desa Wisata

1. Peningkatan Kapasitas Peserta

Kegiatan PKM diikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pengurus desa wisata, pelaku usaha lokal (*homestay*, kuliner, kerajinan), karang taruna, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan evaluasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan dalam hal pencatatan transaksi sederhana, pengelolaan arus kas, dan penyusunan anggaran. Skor pengetahuan rata-rata peserta meningkat lebih dari 40% setelah mengikuti pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat desa wisata dapat menjadi fondasi untuk pengelolaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Penerapan buku kas sederhana dan pelaporan rutin berkontribusi pada peningkatan transparansi dan tata kelola internal. Temuan ini mendukung pedoman pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dikeluarkan oleh (UNWTO, 2018) dan (OECD, 2016), yang menekankan pentingnya pelatihan dan inovasi bagi masyarakat desa.

Selain itu, praktik monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama program ini juga konsisten dengan rekomendasi (Suryawan & Prasetyo, 2020) tentang perlunya mekanisme M&E dalam program pemberdayaan desa wisata.

2. Implementasi Praktis

Beberapa pengelola mulai menggunakan buku kas sederhana dan format manual yang diperkenalkan. Meski masih tahap awal, hal ini menjadi langkah penting menuju akuntabilitas finansial. Pendampingan hybrid membantu peserta yang sebelumnya kesulitan memahami konsep abstrak menjadi lebih mudah ketika diaplikasikan langsung pada usaha mereka.

3. Publikasi dan Dokumentasi

Program menghasilkan beberapa luaran, di antaranya artikel populer yang dipublikasikan di media massa nasional, dokumentasi video yang diunggah ke YouTube, serta modul pelatihan yang diserahkan kepada pengelola desa. Modul ini menjadi pedoman praktis yang dapat digunakan secara mandiri.

4. Analisis Kendala

Kendala utama yang dihadapi adalah:

- a) Keterbatasan literasi awal: Peserta memiliki pemahaman keuangan yang sangat beragam.

Peserta memiliki tingkat pemahaman keuangan yang sangat beragam—mulai dari yang sudah terbiasa mencatat transaksi sederhana hingga yang sama sekali belum pernah melakukan pencatatan. Perbedaan ini menyebabkan kecepatan belajar tidak merata dan menuntut fasilitator untuk menyesuaikan metode pengajaran. Peserta dengan literasi rendah cenderung pasif di awal sesi, karena konsep seperti arus kas, modal kerja, dan saldo akhir masih asing bagi mereka. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Lusardi & Mitchell, 2014) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan sering menjadi penghambat utama dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, terutama di masyarakat non-perkotaan.

- b) Waktu yang padat: Banyak peserta memiliki pekerjaan tambahan di luar kegiatan desa wisata.

Sebagian besar peserta merupakan pelaku usaha kecil, pengelola homestay, pedagang kuliner, atau pekerja paruh waktu di sektor lain. Akibatnya, waktu yang tersedia untuk mengikuti sesi pendampingan terbatas, terutama pada hari kerja. Kehadiran tidak selalu penuh, dan beberapa peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum sesi selesai. Situasi ini menggambarkan dilema umum dalam program pemberdayaan berbasis masyarakat, di mana komitmen terhadap pelatihan sering kali bersaing dengan tuntutan ekonomi sehari-hari (Rahmawati & Kurniadi, 2021). Untuk mengatasinya, tim pelaksana menerapkan pendekatan hybrid mentoring, mengombinasikan pertemuan tatap muka dan pendampingan daring yang lebih fleksibel (Nugroho & Sari, 2022).

- c) Keterbatasan sarana teknologi: Tidak semua peserta terbiasa dengan aplikasi pencatatan digital.

Walaupun sebagian peserta memiliki telepon pintar, tidak semuanya terbiasa menggunakan aplikasi keuangan digital. Beberapa mengalami kesulitan menginstal atau memahami fitur pencatatan transaksi. Selain itu, koneksi internet di wilayah tersebut kadang tidak stabil, sehingga menghambat pelatihan daring dan pelaporan digital. Kondisi ini memperkuat pentingnya menyediakan alternatif low-tech, seperti format buku kas manual yang sederhana namun fungsional (Widodo & Suryani, 2022). Pendekatan transisional ini sesuai dengan rekomendasi (OECD, 2016) untuk menerapkan teknologi secara bertahap sesuai kesiapan komunitas.

- d) Konsistensi pasca pelatihan: Sebagian peserta belum konsisten menerapkan pencatatan.

Salah satu tantangan terbesar muncul setelah program berakhir. Meskipun sebagian peserta sudah menguasai teknik pencatatan dasar, hanya sekitar 60% yang terus menerapkannya secara rutin. Sebagian lainnya kembali pada kebiasaan lama karena kurangnya monitoring dan dorongan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku keuangan memerlukan waktu dan penguatan berkelanjutan, tidak cukup hanya dengan intervensi jangka pendek (Suryawan & Prasetyo, 2020). Pendampingan lanjutan dan pembentukan kelompok pengelola keuangan lokal diperlukan agar praktik pencatatan menjadi bagian dari budaya organisasi desa wisata (Putnam, 2000).

5. Strategi Mitigasi

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim menerapkan strategi:

- a) Materi disusun bertahap dari konsep sederhana ke aplikasi praktis.

Materi pelatihan disusun secara bertingkat, dimulai dari pengenalan konsep dasar seperti pendapatan, pengeluaran, dan arus kas, kemudian berlanjut ke penerapan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Pendekatan ini penting karena sebagian peserta memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda. Dengan struktur bertahap, peserta dapat membangun pemahaman secara progresif tanpa merasa terbebani.

Strategi ini konsisten dengan pendekatan *contextual and participatory learning* yang disarankan dalam program pemberdayaan berbasis masyarakat (Ambarwati & Suryanto, 2020), di mana pemahaman konsep keuangan dikaitkan langsung dengan situasi ekonomi peserta.

- b) Pendampingan dilakukan fleksibel secara hybrid.

Pendampingan dilakukan dengan memadukan sesi tatap muka dan pendampingan daring (*hybrid mentoring*). Pertemuan tatap muka dimanfaatkan untuk pelatihan intensif dan latihan praktik, sedangkan pendampingan daring digunakan untuk konsultasi lanjutan, pengingat kegiatan, dan koreksi catatan keuangan peserta.

Pendekatan fleksibel ini menjawab tantangan keterbatasan waktu dan mobilitas peserta yang memiliki pekerjaan ganda. Hasilnya, partisipasi dan keterlibatan peserta tetap terjaga. Model pendampingan semacam ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan retensi pengetahuan dan penerapan keterampilan praktis (Nugroho & Sari, 2022).

- c) Alternatif buku kas manual disediakan untuk peserta yang kesulitan dengan teknologi.

Untuk peserta yang belum terbiasa dengan teknologi digital atau memiliki keterbatasan perangkat dan jaringan internet, tim menyediakan format buku kas manual. Format ini dirancang sederhana, berisi kolom pendapatan, pengeluaran, saldo, serta catatan harian transaksi.

Langkah ini tidak hanya meminimalkan hambatan teknologi, tetapi juga memperkuat kebiasaan mencatat yang menjadi inti literasi keuangan. Pendekatan serupa disarankan oleh (Widodo & Suryani, 2022) yang menemukan bahwa penggunaan buku kas manual dapat menjadi jembatan transisional menuju digitalisasi keuangan di masyarakat dengan tingkat literasi rendah.

Selain itu, strategi bertahap dari *low-tech* ke *high-tech* sesuai dengan rekomendasi lembaga internasional seperti (OECD, 2016), yang menekankan pentingnya penerapan teknologi sesuai kesiapan komunitas lokal agar transformasi digital berjalan inklusif.

- d) Monitoring rutin dilakukan guna menjaga konsistensi penerapan.

Monitoring dilakukan setiap dua minggu melalui kunjungan lapangan dan komunikasi daring. Tim pendamping memeriksa buku kas peserta, memberikan umpan balik, serta mencatat perkembangan penerapan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk *social reinforcement* untuk menjaga motivasi dan tanggung jawab peserta.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa peserta yang memperoleh umpan balik rutin lebih konsisten dalam mencatat transaksi dibanding mereka yang tidak terpantau secara aktif. Hal ini sesuai dengan temuan (Suryawan & Prasetyo, 2020) yang menegaskan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi (M&E) berperan penting dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. Selain itu, kegiatan monitoring berperan memperkuat interaksi sosial antar peserta, meningkatkan rasa kebersamaan, dan memperluas modal sosial komunitas (Putnam, 2000), yang menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program berbasis partisipasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program PKM di Desa Wisata Plosokuning berhasil meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajerial para pengelolanya. Melalui pelatihan, pendampingan, dan monitoring, peserta mampu memahami dan mulai menerapkan prinsip pencatatan serta perencanaan keuangan sederhana. Meskipun menghadapi sejumlah kendala, strategi mitigasi yang diterapkan terbukti efektif. Program ini memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan Desa Wisata Plosokuning dan dapat direplikasi di desa wisata lain di Indonesia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan temuan lapangan, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan untuk menjamin keberlanjutan dampak program literasi keuangan di Desa Wisata Plosokuning. Pertama, pemerintah desa bersama pengurus desa wisata perlu menginstitusikan praktik pencatatan keuangan sederhana sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait pencatatan dan pelaporan kas akan membantu menjaga transparansi serta memastikan praktik literasi keuangan tidak berhenti setelah program berakhir. Dalam konteks ini, pembentukan kelompok pengelola keuangan lokal yang beranggotakan perwakilan pelaku

usaha, pengurus desa wisata, dan kader muda desa menjadi penting sebagai bentuk kelembagaan internal yang dapat mengawasi sekaligus mengembangkan praktik tersebut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, perguruan tinggi sebagai mitra pengabdian diharapkan tidak hanya berperan pada tahap pelatihan awal, tetapi juga dalam pendampingan lanjutan. Program *follow-up coaching* yang dilakukan secara berkala dapat memperkuat perilaku pencatatan keuangan dan membantu peserta mengatasi hambatan yang muncul di tahap implementasi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan rekomendasi (Nugroho & Sari, 2022) mengenai pentingnya keberlanjutan intervensi dalam perubahan perilaku finansial di tingkat komunitas. Dalam proses pendampingan ini, penerapan teknologi digital juga dapat diperkenalkan secara bertahap. Bagi peserta yang sudah siap, pelatihan penggunaan aplikasi keuangan sederhana dapat mempercepat proses modernisasi administrasi keuangan. Sementara bagi peserta dengan keterbatasan teknologi, buku kas manual tetap dapat digunakan sebagai sarana transisi (Widodo & Suryani, 2022; OECD, 2016).

Agar kapasitas masyarakat terus tumbuh, dibutuhkan pelatihan kader lokal sebagai fasilitator atau *training of trainers* (ToT). Kader ini akan menjadi sumber daya internal yang mampu melanjutkan fungsi edukasi secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada tim akademik (Supriyadi & Wulandari, 2023). Di sisi lain, integrasi program literasi keuangan ke dalam agenda kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemerintah desa akan memberikan dasar kelembagaan dan dukungan anggaran yang lebih kuat (Bappenas, 2020). Melalui integrasi ini, kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan tidak lagi dipandang sebagai proyek temporer, melainkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan ekonomi desa wisata.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro seperti LKM dan BPR perlu dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk tabungan, pembiayaan usaha, dan sistem pembayaran nontunai (OJK, 2022). Langkah ini tidak hanya memperkuat literasi keuangan, tetapi juga mendukung inklusi keuangan di tingkat desa. Pemerintah desa juga diharapkan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi periodik, misalnya laporan kas bulanan atau evaluasi triwulan, untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas praktik keuangan. Monitoring yang dilakukan secara partisipatif akan memperkuat rasa tanggung jawab dan kebersamaan warga, yang merupakan inti dari modal sosial komunitas (Putnam, 2000).

Akhirnya, model pendampingan literasi keuangan yang telah diterapkan di Desa Wisata Plosokuning memiliki potensi besar untuk direplikasi di desa wisata lain dengan karakteristik serupa. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra lintas wilayah untuk membantu proses adaptasi model ini sesuai kebutuhan lokal (Kemenparekraf, 2023). Selain itu, penelitian lanjutan dalam jangka 12–24 bulan pasca program disarankan untuk menilai keberlanjutan perilaku pencatatan keuangan serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan, efisiensi usaha, dan tata kelola organisasi desa wisata. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, N., & Suryanto, A. (2020). Strategi peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di daerah. *Jurnal Keuangan dan Pemberdayaan*, 7(2), 101–116.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kepariwisataan Indonesia 2024. BPS RI.
- Bappenas. (2020). *Kebijakan pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis komunitas*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Cooper, C., & Hall, C. M. (2018). *Contemporary tourism: An international approach*. Abingdon, UK: Routledge.
- Haryanto, T. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata: Studi kasus di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata dan Pemberdayaan*, 3(1), 45–58.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Pedoman pengembangan desa wisata dan pemberdayaan ekonomi lokal*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Panduan pengembangan desa wisata berkelanjutan*. Jakarta, Indonesia: Kemenparekraf RI.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>

- Molyneaux, K., & Scott, N. (2017). Community-based tourism and local engagement: A review of best practices. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(9), 1234–1251. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1206112>
- Nugroho, A., & Sari, P. (2022). Dampak pelatihan literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro: Program pendampingan hybrid. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 9(3), 211–227.
- OECD. (2016). Promoting better life for rural communities through tourism and entrepreneurship. Paris, France: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta, Indonesia: OJK.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York, NY: Simon & Schuster.
- Putri, D. A., & Hidayat, R. (2023). Penguatan literasi keuangan bagi pelaku usaha desa wisata melalui pelatihan dan pendampingan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri*, 2(4), 250–259.
- Rahmawati, D., & Kurniadi, S. (2021). Peran lembaga pendidikan tinggi dalam pengabdian masyarakat: Model pendampingan berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian*, 5(1), 12–28.
- Sukmana, R., & Ibrahim, M. (2021). Financial management practices and sustainability of community-based tourism enterprises. *Tourism Economics*, 27(8), 1719–1735. <https://doi.org/10.1177/1354816619888273>
- Supriyadi, E., & Wulandari, F. (2023). Pengembangan kapasitas manajerial pada pengelola desa wisata melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Abdimas Pariwisata Nusantara*, 4(2), 88–96.
- Suryawan, I. G. N., & Prasetyo, E. (2020). Model monitoring dan evaluasi program pemberdayaan desa wisata. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 6(2), 77–90.
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2018). *Tourism for sustainable development in rural areas*. Madrid, Spain: UNWTO.
- Widodo, S., & Suryani, L. (2022). Implementasi sistem pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM di wilayah desa wisata. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, 5(1), 35–44.
- World Bank. (2014). *Financial capability and inclusion: Lessons from global practices*. Washington, DC: World Bank Group.